

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di dalam frasa *truth and reconciliation* nampak bahwa istilah “kebenaran” terletak sebelum kata rekonsiliasi (Kurniawan, 2014:ix). Hal ini menampakkan bahwa yang satu menjadi syarat mutlak bagi hal lainnya. Itulah yang seharusnya dilakukan para pelaku penculikan aktivis 1998 dan para penyokong peristiwa kerusuhan dan penghilangan paksa itu. Rekonsiliasi tidak bisa dimulai dari sebuah keingkaran, melainkan harus dimulai dari sebuah pengakuan. Namun, kenyataannya berbanding terbalik, para pelaku juga penyokong peristiwa itu justru sibuk menyangkal dan membela diri sembari terus mempropagandakan pembangunan.

Siapa yang tidak mengenal Orde Baru dengan segenap penguasa dan kekuasaannya? Runtuhnya kekuasaan Orde Lama yang dipimpin Presiden Soekarno menandakan munculnya kekuasaan baru. Entah lebih baik atau lebih buruk, yang jelas kekuasaan baru yang akrab disapa Orde Baru ini terkenal otoriter, bahkan sejak awal kepemimpinannya. Kekuasaan Soeharto populer dengan *patron client*-nya, berkuasa selama 32 tahun pada kurun waktu 1966-1998. Rezim ini memang terkenal buruk, namun tidak dipungkiri bahwa kebaikannya pun melekat di ingatan.

Catatan sejarah Indonesia modern menuliskan bahwa negara ini pernah mengalami dua peristiwa sosial-politik dan ekonomi terbesar yang terjadi selama tahun 1966 dan tahun 1998. Catatan pertama memperlihatkan bukti

bahwa historiografi mengalami perubahan sebanyak tiga kali, yakni sebelum 1971, sepanjang masa konsolidasi rezim Orde Baru dan setelah tahun 1998. Kedua, historiografi ini bahkan masih berada pada tahap pembuatan (*in the making*) yang diiringi dengan terus berlangsungnya pertarungan wacana politik. Kemudian demi mempertahankan konsolidasi kekuasaannya, Orde Baru melalui Kopkamtib menghilangkan seluruh sumber bahan G-30-S.

Jika rezim Orde Baru berdiri dari sebuah konflik politik dan pelanggaran HAM terbesar sepanjang sejarah, jatuhnya kekuasaan Orde Baru yang kemudian dinamakan reformasi juga bukan dengan mudah. Melainkan lewat konflik politik dan jatuhnya korban jiwa yang dikatakan pelanggaran HAM pula. Sejarah mencatat, upaya menekan Presiden yang lebih pantas disebut Penguasa ini harus melalui serangkaian ketegangan. Tulisan Nezar Patria yang terbit dalam majalah tempo waktu itu menceritakan dengan jelas pengalaman Nezar dan kawan-kawannya selama melawan rezim ini. Bertahun-tahun hidup dalam ketakutan, nomaden dari satu tempat ke tempat yang lain untuk mencari perlindungan, hingga menyamarkan identitas adalah cara agar Nezar dan kawan-kawannya tidak terciduk oleh kalangan intel yang kapanpun dapat membawa mereka ke neraka. Sampai akhirnya Nezar dan dua kawannya ditangkap di rumah susun Klender pada sore hari menjelang petang. Sejak itu hidupnya berganti, hanya tentang sel-sel besi di bawah tanah, interogasi, penyiksaan, hingga beberapa kawannya hilang dan tak kembali.

Dikutip dari Widjojo (1999), dinamika kehidupan dan kegiatan kemahasiswaan selama masa Orde Baru saat itu berada di bawah hegemoni

negara. Pembatasan kegiatan mahasiswa ini ditandai dengan tiga hal, yakni pembentukan KNPI pada 1973, pembekuan Dewan Mahasiswa yang menyebabkan lumpuhnya organisasi mahasiswa, dan berlakunya konsep NKK/BKK yang muatannya lebih bersifat politis dan edukatif. Hal ini menyebabkan terhambatnya dinamika kehidupan kampus dan membuat mahasiswa tidak lagi memiliki keleluasaan untuk berekspresi. Watak Orde Baru yang anti kritik dan anti perubahan muncul kembali dalam berbagai tindakan represifitas aparat menghadapi demonstrasi yang dibuktikan dengan disahkannya Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 tentang unjuk rasa. Upaya mengkritik yang dibungkam, hingga pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat yang disengaja, mengawasi oposisi penguasa, hingga penculikan dan penghilangan paksa. Sebelum akhirnya rezim ini runtuh bersama kekuatan militer yang melindungi dan nepotisme di sekelilingnya, bergaunglah reformasi.

Novel “Laut Bercerita” mungkin menjadi satu dari banyak karya-karya sastra Leila yang mengangkat tema tentang kritik sosial dan politik kepada Pemerintah, khususnya rezim Orde Baru. Melalui novel ini pula, Leila S. Chudori selaku penulis berusaha menjelaskan berbagai konflik politik dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang terjadi menjelang reformasi. Jika pemerintah tetap bungkam dengan berbagai aksi tuntutan yang dilakukan, diupayakan sedemikian rupa demi mencari keadilan. Maka melalui karya seni berupa lagu hingga karya sastra berupa puisi dan novel inilah, kritik dapat disampaikan secara leluasa, serta dikomunikasikan dengan kemasan yang

berbeda dan tidak meninggalkan unsur politis yang berusaha disampaikan. Melalui novel ini pula, konflik politik dikemas dengan cara yang berbeda, dengan bubuhan alur fiksi yang diiringi dengan fakta. Tentu menjadi berbeda pula ketika novel ini dianalisis dan ditelusuri lebih jauh untuk mengungkap kondisi sosial-politik ketika itu dan bagaimana Leila S. Chudori menggambarkan hubungan antara negara, rezim, dan masyarakatnya.

Leila S. Chudori, merupakan penulis beberapa buku yang bercerita tentang sejarah dan kritik atas situasi sosial politik yang terjadi. Mirip dengan karya sebelumnya yang berjudul “Pulang”, novel “*Laut Bercerita*” berusaha menyampaikan sebuah keresahan dari mahasiswa yang berjuang menyampaikan kebenaran melalui kehidupan aktivis mahasiswa pada tahun 1998. Sebuah perjalanan dan perjuangan yang tidak mudah melawan rezim yang telah berkuasa selama 32 tahun. *Laut Bercerita* mencoba membuka luka lama mengenai para mahasiswa yang disiksa dan dihilangkan secara paksa sepanjang tahun 1998. Karya sastra ini juga terinspirasi dari tulisan Nezar Patria yang berjudul “Di Kuil Penyiksaan Orde Baru”. Bercerita tentang perjalanan Biru Laut dan kawan-kawannya selama menjadi aktivis mahasiswa yang aktif mengkritik pemerintah, hingga akhirnya hilang dan tidak kembali. Menyajikan pula sudut pandang adik Biru Laut, Asmara Jati yang mengalami pergolakan batin luar biasa namun harus berusaha tegar sembari mencari keadilan untuk kakaknya. Tidak hanya tentang konflik politik, novel ini juga menyajikan konflik batin para tokohnya menghadapi rezim Orde Baru membuatnya menarik untuk ditelusuri.

Karya sastra buatan tangan Leila S. Chudori ini memiliki *setting* mengenai kondisi sosial politik yang terjadi, yakni mengandung unsur konflik politik dan pelanggaran HAM. Novel “Laut Bercerita” menggambarkan konflik politik ketika rezim Orde Baru ini berada di ujung tanduk, bagaimana pada masa itu aktivis dan mahasiswa sudah seringkali menentang pemerintah dengan mengadakan aksi demonstrasi di beberapa daerah. Puncaknya adalah hilangnya aktivis mahasiswa dalam kurun waktu Maret-Mei 1998, hingga jatuhnya kekuasaan Orde Baru yang ditandai dengan reformasi. Melalui novel ini, pelanggaran HAM dilihat melalui bagaimana bahasa digunakan untuk menyampaikan sebuah konstruksi kekuasaan yang menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia.

Penelitian ini menjadikan karya sastra sebagai objek penelitian karena di dalamnya terkandung bagaimana sebuah rezim bertindak represif, menyebabkan konflik politik, hingga melakukan pelanggaran HAM berat yang hingga kini belum terselesaikan. Rentetan konflik politik dan pelanggaran HAM yang diceritakan melalui Novel ini menjadi titik balik peneliti dan akhirnya menitikberatkan penelitian ini pada bagian tersebut. Dalam penelitian ini, Hak Asasi Manusia (HAM) dan pelanggarannya akan menjadi data yang kemudian menguatkan proses penelitian dengan analisis wacana ini.

Laporan Penyelidikan Pelanggaran HAM Berat yang diterbitkan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menuliskan bahwa berdasarkan laporan korban maupun keluarga korban, peristiwa sepanjang Orde Baru telah menimbulkan berbagai peristiwa pelanggaran hak asasi manusia terhadap kemanusiaan.

Seperti pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa, perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang, penyiksaan, perkosaan, penganiayaan, dan penghilangan orang secara paksa. Tak hanya itu, keluarga korban juga mengalami trauma psikis dan mental yang mengganggu psikologis, berupa diskriminasi hak sipil dan politik, serta hak ekonomi, sosial, dan budaya. Lalu mengapa kasus pelanggaran HAM ini tidak kunjung selesai? Bagaimana negara otoriter terbentuk melalui banyak kewacanaan tunggal?

Sejak lama, Indonesia memiliki pendapat yang cukup kuat dan menganggap bahwa negara sebagai institusi yang netral, tidak berpihak, dan mengabdikan kepada kepentingan umum dengan dalih berdiri di atas seluruh lapisan masyarakat. Thomas Hobbes dikutip oleh Budiman (1996:7) menekankan pada pentingnya kekuasaan negara, yang apabila ditiadakan, dapat menyebabkan warga negara saling berkelahi untuk mendahulukan kepentingan mereka. Dari sini kemudian muncul hipotesa bahwa negara mewakili kepentingan masyarakat, sedangkan masyarakat akan mendahulukan kepentingan masing-masing. Kekuasaan mutlak yang otoriter inilah yang kemudian menimbulkan konflik politik dalam sebuah negara. Karena dengan kekuasaan mutlak ini, seorang penguasa dapat dengan leluasa menggunakan kekuasaannya dan selalu ditopang oleh kekuatan militer. Kekuatan militer ini juga yang kemudian diikuti kekuatan ideologi untuk melegitimasi kekuasaannya. Jika sebuah pemerintahan cenderung lebih kuat dari rakyatnya, maka yang kemudian timbul adalah sistem yang otoriter (Budiman, 1996:39).

Melalui teknik analisis wacana, realitas mengenai konflik politik yang terjadi selama masa Orde Baru akan dibangun dan dikorelasikan dengan teori Negara kekuasaan yang dikemukakan oleh Thomas Hobbes. Selain konflik politik, pelanggaran HAM yang terjadi selama kurun waktu 32 tahun akan terlihat melalui data-data yang disajikan dalam penelitian ini. Selain itu, melalui analisis wacana pula akan terlihat bagaimana sebuah bahasa yang dalam hal ini merupakan sebuah karya sastra, digunakan untuk menggambarkan sebuah konflik politik yang terjadi akibat praktik kekuasaan rezim Orde Baru. Penelitian ini berusaha mengisi kekosongan penelitian-penelitian sebelumnya, serta membantu pembaca memahami bagaimana rezim Orde Baru melalui sudut pandang yang lain. Karena penelitian ini akan menelusuri konflik politik yang terjadi di aras bawah dan disembunyikan hingga narasi yang terbentuk hanya kewacanaan buatan penguasa.

Penelitian ini akan nampak berbeda dengan penelitian analisis wacana pada umumnya. Selain karena biasanya analisis wacana terdapat pada kajian ilmu komunikasi dan sastra. Penelitian ini berada pada ranah ilmu politik yang akan menguak realitas konflik politik dan pelanggaran HAM Orde Baru pada sebuah karya sastra yang mungkin belum pernah ada. Penelitian ini menjadi menarik karena meneliti konflik politik dan pelanggaran HAM yang terjadi melalui karya sastra berjenis novel.

Analisis wacana Norman Fairclough menekankan pada bagaimana bahasa digunakan dalam praktik kekuasaan. Dalam hal ini bahasa yang dimaksudkan merupakan karya sastra berupa novel, mengandung unsur politik

berupa konflik politik dan pelanggaran HAM yang terjadi selama Era Orde Baru. Penelitian ini akan menganalisis isi novel yang mengandung unsur konflik politik dan pelanggaran HAM selama rezim Orde Baru berkuasa. Melalui analisis nantinya akan terlihat bagaimana bahasa yang dikemas melalui teks sastra ini menggambarkan praktik kekuasaan yang dilakukan oleh rezim penguasa Orde Baru, serta bagaimana negara, rezim, dan masyarakatnya ditampilkan dalam teks.

Penelitian yang akan melalui tiga tahapan analisis ini nantinya akan digunakan untuk dapat melihat tiga masalah yang biasanya terdapat dalam wacana. *Pertama*, representasi bahasa atau objek yang ditampilkan dalam teks. Bagaimana sebuah teks biasanya memiliki muatan ideologis tertentu. *Kedua*, relasi yang menunjukkan konstruksi hubungan antara rezim dengan masyarakatnya, serta bagaimana kemudian teks tersebut dikemas. *Ketiga*, identitas, yang mengacu kepada bagaimana konstruksi identitas personal yang dalam hal ini penulis serta identitas masyarakat ditampilkan di dalam teks (Eriyanto, 2001:287). Agar kemudian mendapatkan kesimpulan bagaimana teks sastra ini digunakan untuk menyampaikan konstruksi sebuah perubahan sosial yang terjadi akibat adanya konflik politik dan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh rezim Orde Baru.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah yang diambil adalah:

1. Bagaimana konflik politik dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) rezim Orde Baru ditampilkan dalam bagian satu Novel “Laut Bercerita”?
2. Bagaimana hubungan antara negara dan masyarakat digambarkan dalam bagian satu Novel “Laut Bercerita”?
3. Bagaimana Orde Baru diidentifikasi dan ditampilkan dalam bagian satu Novel “Laut Bercerita”?

C. Batasan Masalah

Penelitian ini dibatasi pada konflik politik dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) menjelang berakhirnya kekuasaan Orde Baru, serta bagaimana peristiwa-peristiwa itu digambarkan pada bagian satu Novel “Laut Bercerita”.

D. Tujuan Penelitian

1. Melihat konflik politik dan perilaku represif rezim Orde Baru sehingga menyebabkan pelanggaran HAM melalui karya sastra.
2. Memahami praktik kekuasaan dan realitas sosial-politik yang terjadi melalui bahasa yang digunakan penulis dalam karya sastra.
3. Membandingkan bentuk-bentuk konflik politik yang terjadi menjelang runtuhnya Orde Baru, serta bagaimana pelanggaran HAM yang terjadi selama berpuluh tahun ditampilkan dalam sebuah karya politika sastra.

E. Manfaat Penelitian

Adanya hasil penelitian yang menganalisis konflik politik sebuah rezim diharapkan dapat memberikan pengetahuan baru untuk melihat bagaimana realitas sosial-politik yang dibangun setelah melalui tahap analisis. Menambah wawasan dengan metode analisis yang digunakan, sehingga memberikan

sumbangan pengetahuan baru yang masih jarang ditemukan dalam ranah ilmu politik. Menjadi rujukan dan kontribusi pemikiran terutama dalam kajian tentang hak asasi manusia dan komunikasi politik, serta kajian baru yang melihat karya sastra sebagai sebuah media kritik yang akrab disebut politika sastra.